

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IPM PADA DAERAH TERTINGGAL DI PULAU PAPUA TAHUN 2013 – 2017

Firdha Aksari Anindynta^{1)*}, Afrida Boedirochminarni²⁾, Sudarti³⁾, Syamsul Hadi⁴⁾

¹⁾ Dosen Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Muhammadiyah Malang

²⁾ Dosen Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Muhammadiyah Malang

³⁾ Dosen Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Muhammadiyah Malang

⁴⁾ Dosen Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Muhammadiyah Malang

*Korespondensi: firdhaaksari@umm.ac.id

ABSTRACT

The area of Eastern Indonesia especially Papua island consist of two provinces, which are Papua and West Papua that has more disadvantaged regions than other islands. The number of disadvantaged regions in Papua island are 33 districts. The aim of this study to determine the factors that affect HDI (Human Development Index) disadvantaged regions because human resources play an important role in success of region's development and the value of HDI. Regression analysis used panel data with Fixed Effect Model (FEM) from 33 disadvantaged regions of Papua island in 2013-2017. The result of this study is GDP per capita, life expectancy, and school expectation variables have positive and significant effect to HDI in disadvantaged regions of Papua island. The number of poor people's variable do not have effect to Human Development Index (HDI).

Keywords: Human Development Index, disadvantaged regions, panel data

ABSTRAK

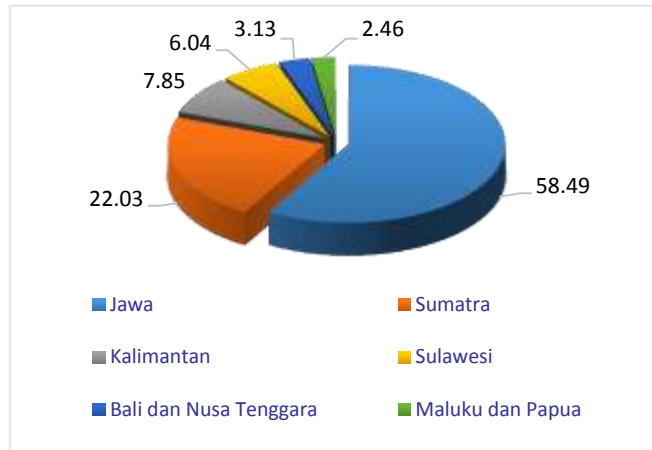
Wilayah Indonesia Timur khususnya Pulau Papua yang terdiri dari dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat memiliki daerah tertinggal yang paling banyak daripada pulau lainnya. Jumlah daerah tertinggal di Pulau Papua sebanyak 33 daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada daerah tertinggal karena sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan pembangunan dan nilai IPM suatu daerah. Analisis regresi menggunakan data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dari 33 daerah tertinggal di Pulau Papua tahun 2013-2017. Hasil penelitian yang diperoleh adalah variabel PDRB perkapita, angka harapan hidup, dan angka harapan sekolah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada daerah tertinggal di Pulau Papua. Variabel jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, daerah tertinggal, panel data

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan tingkat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Menurut (Sukirno, 1966) pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita secara terus menerus dalam jangka panjang. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu variabel yang dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya sangat luas, sehingga setiap wilayah memiliki peran dalam pembentukan PDB nasional. Semakin tinggi peranan suatu wilayah dalam pembentukan PDB nasional memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya pun semakin baik.

Pulau Maluku dan Papua termasuk dalam wilayah Indonesia bagian timur yang berperan paling rendah dalam pembentukan PDB nasional, yaitu hanya sebesar 2,46% di tahun 2017. Terjadi ketimpangan kontribusi yang sangat tinggi antara Pulau Maluku dan Papua dengan pulau lainnya sebagaimana ditampilkan pada gambar 1. Kontribusi tertinggi terhadap PDB nasional adalah Pulau Jawa sebesar 58,49%. Selanjutnya diikuti Pulau Sumatra sebesar 22,03%, Pulau Kalimantan sebesar 7,85%, Pulau Sulawesi sebesar 6,04%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,13%, serta yang terakhir adalah Pulau Maluku dan Papua.



Sumber: BPS, 2018

Gambar 1

Peranan Pulau Terhadap Pembentukan PDB Nasional 2017(%)

Rendahnya peranan Pulau Maluku dan Papua terhadap pembentukan PDB nasional menggambarkan pembangunan wilayah maupun masyarakat masih kurang berhasil karena tingginya pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Kondisi tersebut memunculkan klasifikasi antara daerah maju dan tertinggal.

Setiap pulau di Indonesia memiliki daerah tertinggal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Terdapat 122 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal di Indonesia dan Pulau Papua memiliki daerah tertinggal paling banyak dibandingkan pulau lainnya sebanyak 33 daerah. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, daerah tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

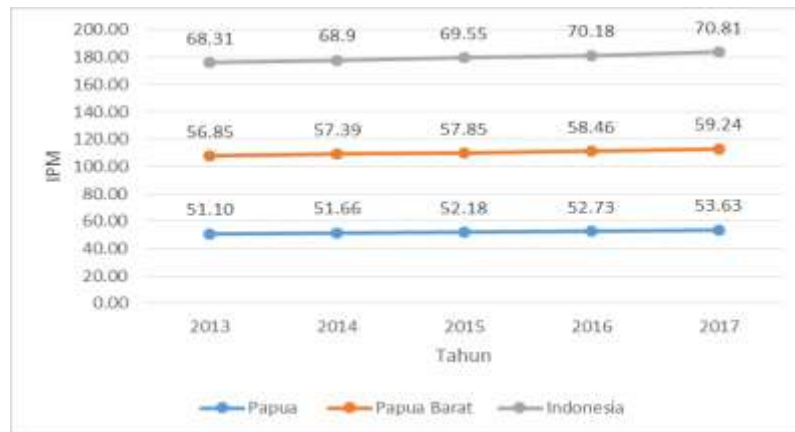
1. Perekonomian masyarakat;
2. Sumber daya manusia;
3. Sarana dan prasarana;
4. Aksesibilitas; dan

5. Karakteristik daerah.

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam penetapan daerah sebagai daerah tertinggal karena pembangunan ekonomi yang seutuhnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas pembangunan manusia yang digambarkan melalui suatu indeks, yaitu HDI (*Human Development Index*) atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia). HDI/IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. UNDP menyusun HDI/IPM sebagai indeks komposit berdasarkan tiga indikator, yaitu angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), serta kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Manfaat IPM adalah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan menentukan level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (BPS, 2018). Amartya Sen dalam bukunya *Development as Freedom* juga mengembangkan IPM. (Sen, 1999) menjelaskan makna dari kebebasan adalah masyarakat dapat merasa sejahtera sebagai hasil dari pembangunan yang tercapai. (Yakunina & Bychkov, 2015) menjelaskan bahwa HDI/IPM dianalisis dalam tiga area yang diestimasi oleh indeks lainnya, antara lain:

1. Indeks angka harapan hidup, yaitu indikator utama dari rata-rata angka harapan hidup di dunia dan indeks ini mengukur kesehatan dan umur panjang masyarakat dari suatu negara.
2. Indeks pendidikan, dimana termasuk didalamnya adalah akses ke pendidikan yang diukur dengan rata-rata harapan hidup sekolah dari anak-anak usia sekolah dan rata-rata lama sekolah dari populasi orang dewasa.
3. Indeks pendapatan nasional bruto adalah metode untuk menilai kualitas hidup manusia yang diukur dengan pendapatan perkapita.

Pada tahun 2017, IPM Indonesia berada di peringkat 116 dari 189 negara di dunia dan tergolong dalam level *medium human development* (UNDP, 2018). Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang masih harus terus berupaya meningkatkan nilai IPM melalui pengurangan ketimpangan IPM antar wilayah di seluruh Indonesia, khususnya pada daerah-daerah tertinggal supaya IPM secara nasional pun meningkat. Rata-rata IPM di daerah tertinggal masih jauh di bawah IPM nasional. Salah satu contohnya adalah IPM pada daerah tertinggal di Pulau Papua yang memiliki rata-rata IPM kurang dari 60 dalam lima tahun terakhir. Pada gambar 2 ditampilkan perbandingan rata-rata IPM daerah tertinggal di Pulau Papua yang terdiri dari dua provinsi, yaitu Provinsi Papua yang memiliki 26 kabupaten sebagai daerah tertinggal dan Provinsi Papua Barat yang memiliki 7 kabupaten sebagai daerah tertinggal dengan IPM nasional dari tahun 2013 sampai 2017.



Sumber: BPS, 2017

Gambar 2

Perbandingan Rata-Rata IPM Daerah Tertinggal di Pulau Papua dengan IPM Nasional 2013-2017

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di berbagai wilayah atau negara tentang HDI/IPM

supaya dapat merumuskan kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan IPM, sehingga dapat tercipta kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan mengurangi ketimpangan/gap antar daerah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, hasil penelitian dari Anand dan Ravallion (2013) menjelaskan bahwa pada negara miskin seperti Sri Lanka, peningkatan HDI/IPM dapat menurunkan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan sarana publik yang berkorelasi positif dengan angka harapan hidup serta kemakmuran rakyat. Penelitian lain dari Martinez (2012) menyebutkan adanya gap antara daerah maju dan daerah tertinggal karena HDI/IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah.

Daerah dengan IPM yang rendah di Indonesia cenderung tergolong sebagai daerah tertinggal. Hal tersebut dibarengi dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta kondisi ekonomi yang cenderung berada pada kemiskinan, sehingga mencerminkan kualitas sumber daya masyarakat dan pembangunan secara regional yang kurang baik. Hal ini sangat timpang dengan daerah lain di Indonesia khususnya bagian barat. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi IPM, yaitu variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk miskin, angka harapan hidup, dan angka harapan sekolah pada daerah tertinggal di Pulau Papua tahun 2013-2017. Harapannya setelah diketahui faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap IPM khususnya pada daerah tertinggal di Pulau Papua, nantinya dapat menentukan kebijakan yang sesuai supaya IPM dapat ditingkatkan dan tidak terjadi gap yang semakin besar dengan daerah lainnya.

METODE

Penelitian ini ingin menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap IPM pada daerah tertinggal di Pulau Papua yang terdiri dari 33 kabupaten di tahun 2013-2017. Variabel dependen yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan empat variabel independen, yaitu PDRB perkapita,

jumlah penduduk miskin, angka harapan hidup, dan angka harapan sekolah. Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode untuk analisis regresi menggunakan data panel karena terdiri dari gabungan antara data *cross section* yang terdiri dari 33 daerah tertinggal dan *time series* dari 2013 hingga 2017. Teknik analisis dalam data panel terdiri dari tiga, yaitu *Pooled OLS Model*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Selanjutnya dari ketiga model tersebut, dilakukan uji untuk menentukan model mana yang sesuai. Uji yang dapat dilakukan adalah Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM (Gujarati, 2012).

Uji Chow untuk menentukan model mana yang lebih baik digunakan antara *Pooled OLS Model* dan *Fixed Effect Model*. Selanjutnya, uji LM adalah untuk memilih antara *Pooled OLS Model* dengan *Random Effect Model*. Uji yang terakhir adalah uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil dari uji tersebut, model yang baik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* dengan persamaan regresi sebagai berikut:

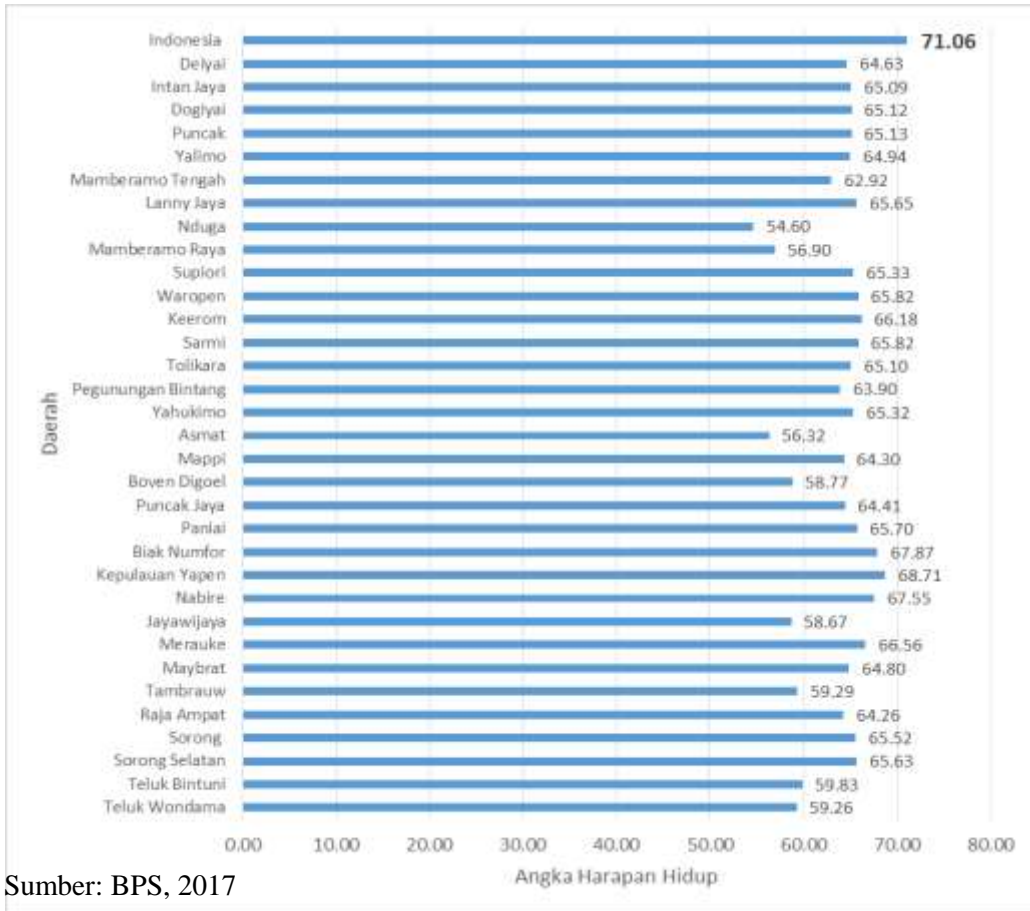
$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \mu_{it} \quad (1)$$

Dimana Y merupakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), β_0 adalah konstanta, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ adalah koefisien regresi, X_1 adalah PDRB perkapita, X_2 adalah jumlah penduduk miskin, X_3 adalah angka harapan hidup, X_4 adalah angka harapan sekolah, dan μ adalah *error term*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah/daerah dapat diketahui dari tingi rendahnya nilai IPM karena pada dasarnya komponen penting dalam pembangunan adalah sumber daya manusia. (Pangestika & Widodo, 2017) menyebutkan bahwa kemajuan atau kemunduran dari capaian sasaran pembangunan di suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan IPM. Setiap daerah yang tergolong daerah maju maupun tertinggal akan berusaha meningkatkan nilai IPM setiap tahunnya, meskipun persentase kenaikannya sangat kecil. Hal ini juga terjadi pada daerah tertinggal di Pulau Papua yang persentase kenaikan IPM setiap tahunnya hanya berkisar 1-2% dan masih jauh dari peningkatan IPM nasional maupun daerah lainnya.

Komponen pembentuk IPM di Indonesia mengadopsi indikator IPM dari UNDP. Komponen pertama adalah umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan dari angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada obyek penelitian, yaitu daerah tertinggal di Pulau Papua dari tahun 2013-2017 masih di bawah angka harapan hidup nasional. Salah satu contohnya pada tahun 2017, dimana rata-rata angka harapan hidup dari daerah tertinggal di Pulau Papua adalah 63 tahun, sedangkan angka harapan hidup nasional adalah 71 tahun. Berikut adalah perbandingan angka harapan hidup daerah tertinggal di Pulau Papua dengan angka harapan hidup Indonesia tahun 2017:



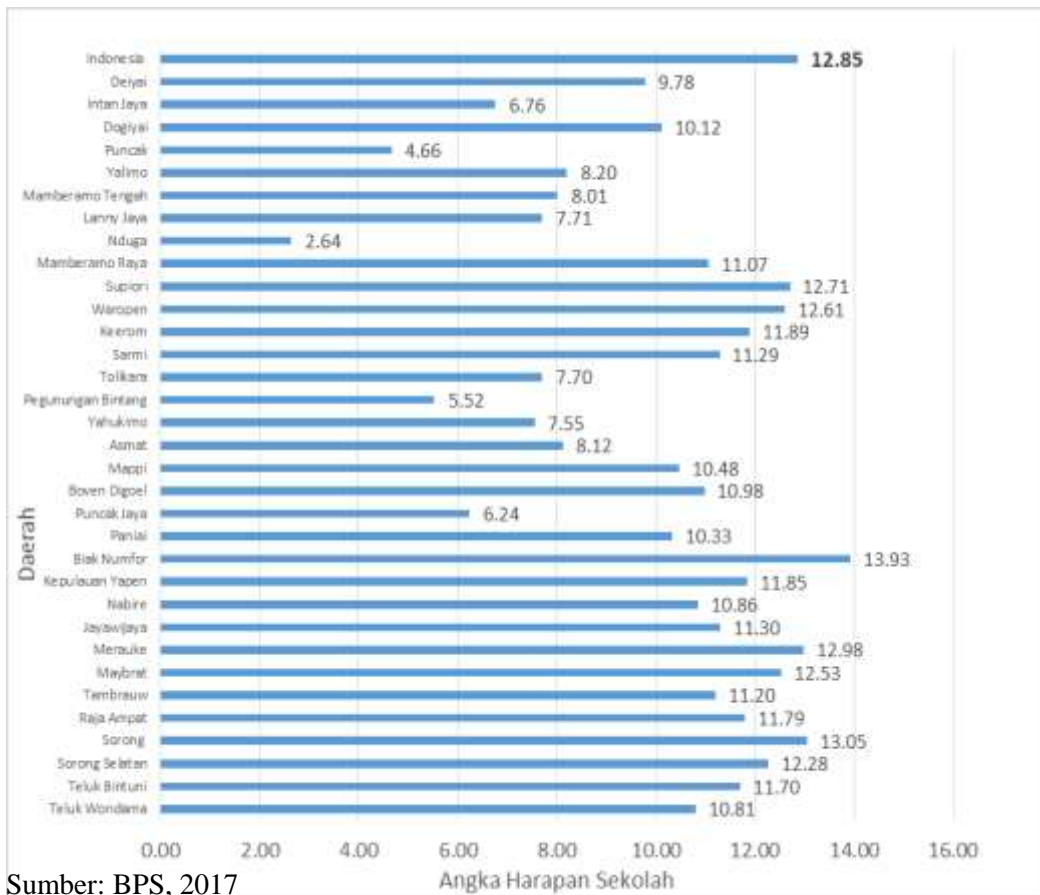
Sumber: BPS, 2017

Gambar 3

Perbandingan Angka Harapan Hidup Daerah Tertinggal di Pulau Papua dengan Indonesia 2017

Pada gambar 3, angka harapan hidup terendah adalah Kabupaten Nduga sebesar 54,60 tahun dan angka harapan hidup tertinggi adalah 67,87 tahun pada Kabupaten Nabire. Hal ini memperlihatkan bahwa perbandingan antara angka harapan hidup setiap daerah tertinggal dengan angka harapan hidup nasional masih jauh, sehingga kualitas kesehatannya pun masih kurang dan perlu untuk dilakukan perbaikan supaya angka harapan hidupnya meningkat.

Komponen pengetahuan dapat dilihat dari angka harapan sekolah. Rata-rata angka harapan sekolah tahun 2017 pada 33 daerah tertinggal di Pulau Papua adalah 9 tahun, padahal angka harapan sekolah nasional 12 tahun. Mirisnya masih terdapat daerah yang memiliki angka harapan sekolah kurang dari 6 tahun, sehingga tidak semua penduduknya bisa menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya. Secara detail akan ditampilkan angka harapan sekolah tahun 2017 pada 33 daerah tertinggal di Pulau Papua dengan angka harapan sekolah di Indonesia.



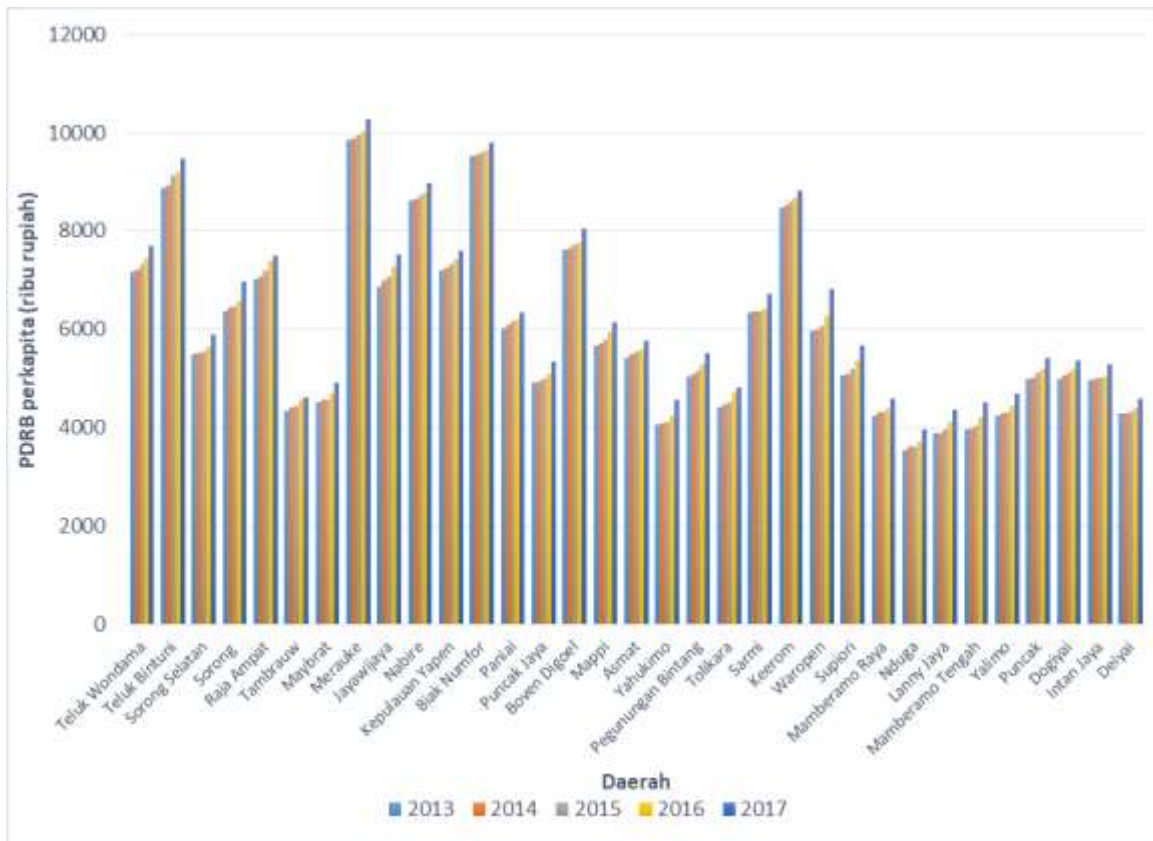
Sumber: BPS, 2017

Gambar 4

Perbandingan Angka Harapan Sekolah Daerah Tertinggal di Pulau Papua dengan Indonesia 2017

Pada gambar 4, angka harapan sekolah terendah adalah Kabupaten Nduga sebesar 2,64 tahun dan angka harapan sekolah tertinggi adalah 13,93 tahun pada Kabupaten Biak Numfor. Secara umum angka harapan sekolah pada daerah tertinggal di Pulau Papua sudah cukup baik karena lebih dari 9 tahun yang artinya dapat memenuhi wajib belajar dari pemerintah. Bahkan ada salah dua daerah yang angka harapan sekolahnya bisa melebihi angka harapan sekolah nasional, yaitu 13 tahun. Namun di sisi lain, masih ada pula daerah yang angka harapan sekolahnya sangat rendah hanya 2 – 4 tahun. Ini artinya terjadi ketimpangan angka harapan sekolah yang cukup besar antar daerah tertinggal di Pulau Papua yang mencerminkan tidak meratanya pembangunan pendidikan.

Komponen pembentuk IPM yang terakhir adalah standar hidup layak yang dicerminkan dari kondisi ekonomi masyarakat melalui tingkat pengeluaran masyarakat berdasarkan PDRB perkapita. PDRB perkapita antar daerah tertinggal di Pulau Papua bervariasi, ada yang rendah dan ada juga yang cukup tinggi. PDRB perkapita daerah tertinggal di Pulau Papua selalu mengalami peningkatan, meskipun persentasenya kurang dari 10% setiap tahunnya.



Gambar 5

PDRB perkapita Daerah Tertinggal di Pulau Papua Tahun 2013-2017

Pada gambar 5 menggambarkan bahwa PDRB perkapita untuk 33 daerah tertinggal di Papua selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai 2017. Masih terdapat ketimpangan PDRB perkapita antar daerah tertinggal karena ada beberapa daerah yang tinggi, yaitu hampir mencapai Rp10.000.000,00 tetapi juga banyak daerah yang PDRB perkapitanya kurang dari Rp6000.000,00. Dalam lima tahun terakhir, daerah tertinggal di Pulau Papua yang memiliki PDRB perkapita paling kecil adalah Kabupaten Nduga dan yang paling besar adalah Kabupaten Merauke.

Hasil Analisis Data

Analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Variabel dependen (Y) yang digunakan adalah IPM dan empat variabel independen, yaitu PDRB perkapita (X1), jumlah penduduk miskin (X2), angka harapan hidup (X3), serta angka harapan sekolah (X4). Persamaan *Fixed Effect Model* berdasarkan hasil regresi data panel adalah:

$$Y = -7,440719 + 0,0021158 X_1 - 0,0000165 X_2 + 0,4930962 X_3 + 1,803499 X_4 + \mu \quad (2)$$

Tabel 1
Hasil Estimasi Data Panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM)

Variabel Dependen: IPM (Y)				
Variabel Independen	Pengaruh	Koefisien	Prob	Std. Error
Constanta	-	-7,440719	0,216	5,983604
PDRB perkapita (X1)	+	0,0021158	0,000	0,0002137
Jumlah penduduk miskin (X2)	-	-0,0000165	0,350	0,0000176
Angka harapan hidup (X3)	+	0,4930962	0,000	0,1074956
Angka harapan sekolah (X4)	+	1,803499	0,000	0,137524
R-square within	0,9399			
Prob F	0,0000			

Sumber: Data diolah, 2018

Koefisien regresi untuk variabel PDRB perkapita (X1) sebesar 0,0021158 yang artinya jika terjadi peningkatan 1 satuan pada PDRB perkapita (X1), maka akan terjadi peningkatan 0,0021158 pada IPM (Y). Koefisien regresi untuk variabel jumlah penduduk miskin (X2) sebesar 0,0000165 yang artinya jika terjadi peningkatan 1 satuan pada jumlah penduduk miskin (X2), maka akan terjadi penurunan 0,0000165 pada IPM (Y). Selanjutnya, koefisien regresi untuk variabel angka harapan hidup (X3) sebesar 0,4930962 yang artinya jika terjadi peningkatan 1 satuan pada angka harapan hidup (X3), maka akan terjadi peningkatan 0,4930962 pada IPM (Y). Variabel yang terakhir, yaitu angka harapan sekolah (X4) memiliki koefisien regresi sebesar 1,803499 yang artinya jika terjadi peningkatan 1 satuan pada angka harapan sekolah (X4), maka akan terjadi peningkatan 1,803499 pada IPM (Y).

Hasil regresi data panel dengan *Fixed Effects Model* menghasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 93,99%. Ini artinya variabel IPM dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk miskin, angka harapan hidup, serta angka harapan sekolah sebesar 93,99% dan sisanya sebesar 6,01% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum masuk dalam model. Selanjutnya untuk uji statistik secara simultan ditunjukkan dengan nilai prob F = 0,0000 atau 0% kurang dari $\alpha = 5\%$ yang artinya variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk miskin, angka harapan hidup, serta angka harapan sekolah secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM pada daerah tertinggal di Pulau Papua. Hasil uji statistik secara parsial adalah untuk melihat bagaimana pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya yang secara ringkas akan ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Pengaruh Variabel

Variabel Independen	Hasil Regresi	Pengaruh
PDRB perkapita (X1)	Positif	Signifikan
Jumlah penduduk miskin (X2)	Negatif	Tidak Signifikan
Angka harapan hidup (X3)	Positif	Signifikan
Angka harapan sekolah (X4)	Positif	Signifikan

Sumber: Penulis, 2018

Variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,0021158 terhadap IPM pada daerah tertinggal di Pulau Papua. PDRB perkapita yang digunakan di sini adalah PDRB perkapita pengeluaran yang dapat menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin tinggi pula pengeluaran atau daya beli masyarakat karena pendapatannya pun demikian, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengakselerasi proses pembangunan. Hal ini juga didukung dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. (Smith, 2016) menyimpulkan bahwa GDP perkapita adalah faktor yang berpengaruh signifikan terhadap HDI/IPM. (Arisman, 2018) juga menyebutkan dalam penelitiannya bahwa pertumbuhan GDP perkapita memiliki pengaruh positif terhadap IPM pada negara-negara di ASEAN. Penelitian lain dari (Kyswanto, 2017) juga menjelaskan pengaruh positif signifikan PDRB perkapita terhadap IPM pada 6 daerah tertinggal di Pulau Jawa. Meskipun sama-sama daerah tertinggal, kondisi PDRB perkapita daerah tertinggal di Pulau Papua masih jauh di bawah daerah tertinggal di Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Papua khususnya pada daerah-daerah tertinggal harus terus berupaya untuk menggali dan meningkatkan potensi daerah yang dapat mendukung perbaikan kondisi perekonomian daerah supaya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang nantinya dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berimplikasi terhadap IPM.

Variabel lain yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada daerah tertinggal di Pulau Papua adalah angka harapan hidup sebesar 0,4930962. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesehatan dan mengevaluasi program maupun kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin lama angka harapan hidup mencerminkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi karena mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalornya. Selain itu kesehatan lingkungan di daerahnya pun terjaga dengan baik. Tingkat kesehatan masyarakat dan lingkungan pada daerah tertinggal di Pulau Papua harus terus ditingkatkan dengan dukungan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai

karena akses menuju Papua pun tidak mudah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan kalori juga harus terjamin supaya masyarakat terhindar dari gizi buruk. Jika secara fisik sehat, masyarakat akan lebih mudah untuk beraktivitas secara produktif. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari (Eren, et. al., 2014) yang menyebutkan angka harapan hidup saat lahir memiliki pengaruh signifikan dengan HDI/IPM. Penelitian lain dari (Melliana dan Zain, 2013) dan (Bhakti, 2012) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan supaya dapat meningkatkan angkatan harapan hidup merupakan faktor yang berpengaruh terhadap IPM. Pada dasarnya upaya peningkatan kesehatan pada suatu daerah membutuhkan dukungan yang cukup besar dari pemerintah pusat maupun daerah serta kesadaran dari masyarakat untuk senantiasa berusaha menjaga kesehatannya.

Varibel terakhir adalah angka harapan sekolah yang berpengaruh positif dan signifikan sebesar 1,803499 terhadap IPM pada daerah tertinggal di Pulau Papua dan menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan IPM dibandingkan dengan variabel lainnya. Angka harapan sekolah merupakan lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Manfat dari angka harapan sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan (IPM BPS, 2018). Pendidikan sangat berperan penting bagi kemakmuran manusia dan kelancaran proses pembangunan karena daerah yang masyarakatnya berpendidikan tinggi akan lebih sejahtera daripada daerah yang kualitas pendidikannya rendah. Hal ini serupa dengan hasil penelitian dari (Çağlayan-akay & Van, 2017) bahwa angka harapan sekolah memiliki pengaruh positif terhadap HDI/IPM dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hasil penelitian lain dari (Eren, et. al., 2014) menyebutkan bahwa angka harapan lama sekolah merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap peningkatan HDI/IPM pada negara tertentu.

Pembangunan dan kualitas pendidikan di wilayah Indoensia sendiri masih belum merata antara wilayah Indonesia bagian timur dengan wilayah Indonesia lainnya, utamanya di Pulau Papua yang memicu rendahnya angka harapan sekolah dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang kurang baik, sehingga mendukung sebagian besar daerah di Pulau Papua tergolong sebagai daerah tertinggal. Dukungan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan juga masih minim di Pulau Papua sehingga angka harapan sekolah belum mampu mewujudkan upaya pendidikan nasional, yaitu wajib belajar 12 tahun. Hanya 2 dari 33 daerah tertinggal di Pulau Papua pada tahun 2017 yang angka harapan sekolahnya 12 tahun dan mirisnya masih terdapat daerah yang memiliki angka harapan sekolah kurang dari 6 tahun. Padahal pendidikan dasar sangatlah penting untuk anak-anak supaya nantinya dapat mencetak generasi penerus bangsa yang gemilang. Sejatinya pembangunan secara fisik dan non fisik harus berjalan secara beriringan dan pendidikan adalah bentuk pembangunan non fisik yang harus terus diupayakan perbaikannya oleh pemerintah. Oleh karena itu, pos terbesar dari anggaran pemerintah adalah untuk pendidikan supaya dapat meningkatkan angka harapan sekolah yang berdampak pada kenaikan IPM dan menciptakan keberhasilan pembangunan manusia. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari (Hamzah, et. al., 2012) bahwa anggaran pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Anggaran pendidikan yang besar tentunya harus

dialokasikan dengan tepat sasaran khususnya pada daerah-daerah yang angka harapan sekolahnya rendah supaya terjadi pemerataan kualitas pembangunan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan dapat mengurangi daerah yang termasuk sebagai daerah tertinggal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa PDRB perkapita, angka harapan hidup, dan angka harapan sekolah merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap penurunan atau peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada daerah tertinggal di Pulau Papua. Jumlah penduduk miskin belum bisa dianggap sebagai faktor yang dapat berkontribusi terhadap nilai IPM pada daerah tertinggal di Papua. Peningkatan pada PDRB perkapita, angka harapan hidup, serta angka harapan sekolah dapat meningkatkan nilai IPM pada daerah tertinggal di Pulau Papua dan sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien analisis regresi yang bertanda positif. Dengan demikian, daerah tertinggal di Pulau Papua harus senantiasa mengupayakan peningkatan PDRB perkapita, angka harapan hidup, dan angka harapan sekolah secara maksimal apabila ingin meningkatkan IPM dan keluar dari klasifikasi daerah sebagai daerah tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, Sudhir dan Ravallion, Martin. (2013). Human Development in Poor Countries: On The Role of Private Incomes and Public Services. *The Journal of Economics Perspective*, 7(1), 133-150. <http://www.jstor.org/stable/2138325>.
- Arisman, A. (2018). Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 113–122. <https://doi.org/10.15408/sjie.v7i1.6756>
- Badan Pusat Statistik. (2018). Indeks Pembangunan Manusia. <http://ipm.bps.go.id/page/ipm>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. (2018). Indeks Pembangunan Manusia: Statistik Dasar. <https://papuabarot.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. (2018). Kemiskinan: Statistik Dasar. <https://papuabarot.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2018). Indeks Pembangunan Manusia: Statistik Dasar. <https://papua.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2018). Kemiskinan dan Ketimpangan: Statistik Dasar. <https://papua.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>
- Bhakti, N. A. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Karet Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 18(80), 452–469.
- Çağlayan-akay, E., & Van, M. H. (2017). Determinants of the Levels of Development Based on the Human Development Index : Bayesian Ordered Probit Model #, 7(5), 425–431.
- Eren, M., Celik, A. K., & Kubat, A. (2014). Determinants of the Levels of Development Based on the Human Development Index: A Comparison of Regression Models for Limited Dependent Variables. *Review of European Studies*, 6(1), 10–22. <https://doi.org/10.5539/res.v6n1p10>
- Gujarati, Demodar N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, M. Z., Risqiani, R., & Sofilda, E. (2012). Human Development Quality and Its Problems in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development*, 5(7), 29–36.
- Kyswantoro, Yunita Firdha (2017). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Human Development Index (HDI) Pada 6 Daerah Tertinggal di Pulau Jawa Tahun 2010-2016. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/5359>.
- Melliana, A. dan Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 2(2), D237–D242. Retrieved from

- http://ejournal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/4844
- Pangestika, M., & Widodo, E. (2017). Analisis Regresi Panel Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota D.I.Yogyakarta. *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 198–205.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Perpres-Nomor-131-Tahun-2015.pdf>
- Sen, A. (1999). *Development Freedom. Development Freedom*. <https://doi.org/10.1215/0961754X-9-2-350>
- Smith, S. (2016). Determinants of Human Development Index: A Cross-Country Empirical Analysis. *National Institute of Bank Management, Pune, India*, (22938), 0–19. <https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000349921.14519.2A>
- Sukirno, Sadono. (1996). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- UNDP. (2018). Human Development: indices and data. Retrieved from hdr.undp.org/en/statistics/hdi
- Yakunina, R. P., & Bychkov, G. A. (2015). Correlation Analysis of the Components of the Human Development Index Across Countries. *Procedia Economics and Finance*, 24(July), 766–771. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00692-9](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00692-9)